

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR DI
KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR**

Mayang Putri Pangesti
NPP. 29.0955

*Asdaf Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: putrimayangpangesti@gmail.com

ABSTRACT (in English)

Problem/Background (GAP): The author's background in taking the title above is the prevalence and unresolved issues of order for beggars, homeless people and abandoned people (PGOT), especially in controlling them. **Objective:** The purpose of this study was to determine the benchmark of the role of controlling beggars, homeless people and abandoned people (PGOT) by the civil service police unit in the city of Nganjuk. **Methods:** This study uses a qualitative research method using Arimbi Horoepoetri and Santosa's theory of the role. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (12 informants), observation, and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the role of controlling beggars, homeless people and abandoned people (PGOT) and by Satpol-PP in several aspects is not yet considered effective, although there are still some obstacles such as the mental attitude of beggars is damaged, the two members of the Satpol PP are limited in controlling and third, the people who continue to give money to the beggars. **Conclusion:** The Role of controlling beggars, homeless people and abandoned people (PGOT) by Satpol-PP has not gone well, this is due to the lack of supporting aspects of measuring the effectiveness of Satpol-PP's work from aspects of goal achievement, integration, and adaptation.

Keywords: The Role, Civil Service Police Unit, Controlling, PGOT

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah maraknya dan belum teratasinya permasalahan ketertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar terkhusus pada penertibannya tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tolak ukur efektivitas penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Nganjuk. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Peran dari Arimbi Horoepoetri and Santosa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (12 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh

penulis dalam penelitian ini yaitu Efektivitas penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh satpol-pp pada beberapa aspek belum tergolong efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti rusaknya sikap mental pengemis, kedua anggota satpol pp dalam penertiban PGOT terbatas dan ketiga, masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para pengemis. **Kesimpulan:** Peran penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) oleh satpol-pp belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya aspek-aspek penunjang suatu pengukuran peran kerja Satpol-pp dari beberapa aspek.

Kata kunci: Efektivitas; Penertiban PKL; SATPOL-PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan banyaknya masalah kemiskinan karena rendahnya pendidikan dan tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Nganjuk masalah yang muncul selanjutnya adalah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar) semakin meningkat. PGOT ialah orang yang hidup dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan norma social yang ada serta rendahnya kesejahteraan sosial yang didapatkan.

Apabila tidak segera dilakukan penertiban pembangunan di Kabupaten Nganjuk akan terganggu. Memerlukan usaha dalam penertiban PGOT oleh pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah membuat perencanaan untuk manggurangi masalah mengenai PGOT, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam menertibkan PGOT sangat dibutuhkan. PGOT di Kabupaten Nganjuk harus segera ditangani apabila dibiarkan begitu saja bisa merugikan bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk sendiri seperti kondisi lingkungan masyarakat yang kotor. Gelandangan yang menempati teras toko, di bawah pohon beralaskan kardus ataupun koran bekas. Kemudian mereka meninggalkan alas tempat tidur dan meninggalkan sampah. Masyarakat banyak yang mengeluh merasa terganggu dengan adanya kehadiran PGOT tersebut. Keberadaan PGOT juga bisa menimbulkan kejahatan seperti mencuri, menjambret, atau bahkan pembunuhan. Dari beberapa masalah yang ada, keberadaan PGOT ini sangat mengganggu. Kemudian contoh lain yang sering terjadi di lampu lalu lintas Kabupaten Nganjuk anak kecil yang mengemis, mereka memaksa untuk meminta, dan apabila pengendara mobil atau motor tidak memberikan uang mereka akan menggoreskan ke arah mobil atau motor pendedara. Upaya yang dilakukan dibutuhkan beberapa cara guna penertiban PGOT melalui komunikasi, perencanaan, pengawasan, pembagian tugas dan tindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam permasalahan PGOT sesuai aturan yang berlaku.

Adapun perumusan masalah dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk?
3. Apa upaya dalam mengatasi faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk?

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan peran penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk oleh satuan polisi pamong praja. Hal ini disebabkan oleh berapa kendala baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas Sumber daya manusia di suatu aparatur pemerintah merupakan salah satu penunjang yang penting dalam sebuah organisasi maupun kelompok. Sumber daya yang baik atau buruknya merupakan suatu yang berpengaruh untuk kualitas pencapaian suatu rencana dengan sesuai yang diharapkan. Sumber Daya Manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat kurang pegawai-pegawai PNS didominasi oleh para THL yang mana mereka masih kurang pengetahuan tentang tugas pokok dari satuan polisi pamong praja. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan SATPOL-PP dan peraturan daerah yang dimana disebabkan belum adanya sosialisasi sama sekali kepada masyarakat dari dinas yang terkait. Selanjutnya rusaknya sikap mental pengemis, kemudian masyarakat yang tetap memberikan uang kepada para pengemis.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Adi Nugroho 2019 & Efisiensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Demak. Fokus Kajiannya adalah penangkapan atau penertiban PGOT yang kemudian diberi pembinaan oleh Dinas Sosial. Metode penelitian kualitatif . Teori yang digunakan adalah teori Peran menurut Miftah Thoha. Hasil Penelitian kurangnya armada atau alat transportasi untuk pelaksanaan penertiban. Najemia 2019 & Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis. Fokus Kajiannya adalah usaha Preventif,

usaha Reprensif dan usaha Rehabilitasi. Metode Penelitian kualitatif deskriptif . Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Menurut Dunn. Hasil Penelitian factor penghambatnya faktor sosial budaya, sumberdaya manusia dan lingkungan. serta keterlibatan lembaga-lembaga social. Natanael Jamson Rumapea 2020 & Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan. Fokus Kajiannya adalah Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori pelaksanaan menurut Browne dan Wildavsky. Hasil Penelitian belum tersedianya panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Kota Medan dan belum adanya upaya preventif untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis. Joshua Fernando 2019 & Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang. Fokus Kajiannya adalah implementasi Perda serta faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi Perda. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Menurut Webster. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi Perda untuk menangani keberadaan anak jalanan dilakukan melalui tahapan perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Jonathan Tribuwono 2017 & Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial). Jonathan Tribuwono 2017 & Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial). Hasil Penelitian kurang efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Nganjuk, dimana penelitian terfokus pada Peran Satuan polisi pamong praja yang didukung oleh pemerintah dalam rangka upaya penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mengganggu trantibum dan selalu menjadi permasalahan kondusifitas lingkungan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada peraturan atau kebijakannya.

1.5. Tujuan

Penulis telah menjabarkan beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan penelitian ini yakni :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk.
 3. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk
- Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberi gambaran yang jelas sesuai dengan situasi – situasi di lapangan dengan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang di dapatkan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan metode dokumentasi dan wawancara secara langsung. Serta analisis yang akan digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah reduksi data atau menyederhanakan data – data yang telah diperoleh, display data atau menyajikan data – data yang sudah direduksi kemudian penarikan kesimpulan terhadap data yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pendapat dari Arimbi Horoepoetri dan Santosa yang menyatakan bahwa peran dapat terjadi dengan menggunakan 5 dimensi, yaitu Peran Sebagai Kebijakan, Peran Sebagai Strategi, Peran Sebagai Alat Komunikasi, Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa dan Peran Sebagai Alat Terapi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori Peran dari Arimbi Horoepoetri dan Santosa yang terbagi atas 5 dimensi yaitu Peran Sebagai Kebijakan, Peran Sebagai Strategi, Peran Sebagai Alat Komunikasi, Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa dan Peran Sebagai Alat Terapi. Selanjutnya kelima dimensi tersebut diuraikan yakni sebagai berikut:

3.1.1. Peran Sebagai Kebijakan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dalam memberikan kebijakan sudah melihat situasi dan kondisi dari permasalahan tersebut, tidak hanya sepihak melihat dari peraturan yang ada. Strategi juga merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam

upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWUJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
Pokok-Pokok Visi	MISI	Penjelasan Misi
BERMARTABAT	Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi "BERMARTABAT", yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang sejahtera melalui: peningkatan kehidupan sosial masyarakat yang religius, yang aman, tentram, dan tertib; peningkatan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis.

Dari Tabel diatas dapat dilihat beberapa arah kebijakan pada Misi 1 yaitu Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

3.1.2. Peran Sebagai Strategi

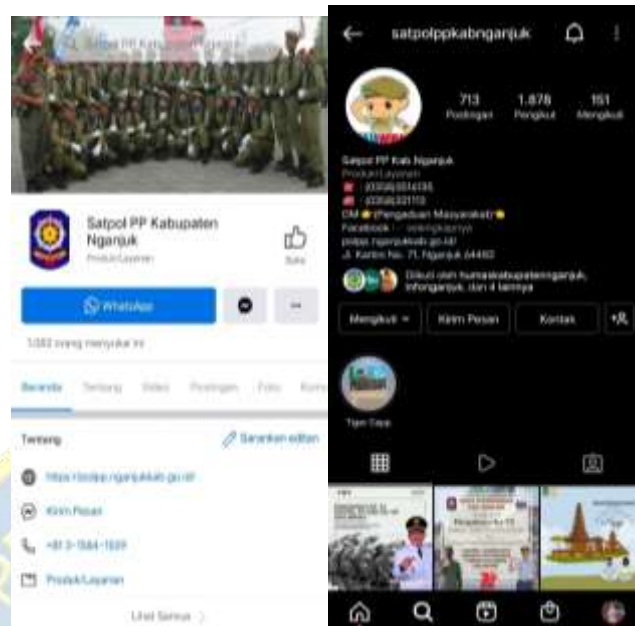
Strategi ialah rangkaian tahapan ataupun langkah- langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya buat mewujudkan tujuan serta sasaran misi pembangunan wilayah yang sudah diresmikan. Sebaliknya Arah kebijakan ialah sesuatu wujud konkrit dari usaha penerapan perencanaan pembangunan yang membagikan arahan serta panduan kepada pemerintah wilayah supaya lebih maksimal dalam memastikan serta menggapai tujuan. Strategi yang sudah dilakukan berdasarkan RPJMD Kabupaten Nganjuk yaitu dengan menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk melalui Gerakan Nganjuk Aman, kemudian strategi yang sering adalah melaksanakan patrol rutin setiap harinya.

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWUJ MBANGUN DESO NOTO KUTHO)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
MISI 1: MEWUJUDKAN TATANAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DINAMIS DAN HARMONIS, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, SERTA DAPAT MEMELIHARA KERUKUNAN, KETENTRAMAN, DAN KETERTIBAN		
1.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran, dan aman	1.1.1 Meningkatkan stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai forum dialog menuju "Gerakan Ngarjuk Damai" b. Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan c. Menjaga keamanan, ketertarikan dan ketertiban umum melalui "Gerakan Ngarjuk Aman"

Dari tabel diatas bisa dilihat beberapa strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Misi 1 ada tujuan, sasaran serta strategi yang harus di buat yaitu strateginya adalah Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum melalui "Gerakan Ngarjuk Aman"

3.1.3. Peran Sebagai Alat Komunikasi

Alat komunikasi merupakan sarana perhubungan. Dilihat dari pengertiannya komunikasi adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjalannya hubungan sosial guna bertahan hidup dalam kehidupan. Untuk menggali informasi serta memberi masukan dan saran untuk penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar Satpol PP memberikan ruang kepada siapapun untuk memberikan informasi melalui social media yaitu whatsapp, instagram, facebook dan kita juga ada website untuk menampung informasi, kritik dan masukan dari masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memberikan informasi, kritik serta saran agar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk terus berbenah kearah yang lebih baik serta dapat meminimalisir menjamurnya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk. Dengan berkurangnya Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk maka kehidupan masyarakat masalah ketentraman dan ketertiban akan lebih baik.



3.1.4. Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Sengketa bisa terjalin antara warga serta antar lembaga. Sengketa ialah perbandingan kepentingan antar orang ataupun lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan- hubungan diantara mereka. Menganalisis siapa serta kenapa mereka ikut serta merupakan salah satu aspek yang berarti dalam riset tentang sengketa. Buat itu butuh dimengerti dengan baik siapa subjek yang ikut serta dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan selaku para pelakon yang ikut serta dalam sengketa, baik pelakon yang pengaruhi maupun yang dipengaruhi. Perihal ini bisa bertabiat orang, warga, kelompok sosial ataupun institusi. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa ataupun beda komentar lewat prosedur yang disepakati para pihak, ialah penyelesaian di luar majelis hukum dengan metode konsultasi, perundingan, mediasi, konsiliasi, ataupun evaluasi pakar. Dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli Satuan Polisi Pamong Praja bisa menyelesaikan permasalahan sengketa dengan baik tidak melalui cara-cara yang bisa merugikan pihak lain maupun organisasi sendiri.

3.1.5. Peran Sebagai Alat Terapi

Terapi merupakan pemulihan dari berbagai hal yang kurang sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada di Pemerintahan. Salah satunya adalah pada masalah ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Alat Terapi berarti lebih menekankan pada cara untuk memberikan efek jera atau pemulihan kepada para pelanggar aturan, peraturan serta kebijakan. Penanggulangan pengemis, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Nganjuk dek melalui usaha-usaha preventif, represif, rehabilitative bertujuan agar berkurangnya PGOT, dan meluasnya akibat dari PGOT dan menjadikan PGOT menjadi anggota masyarakat yang menghargai harga dirinya, serta membuat para PGOT ini mempunyai keterampilan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik dan layak sesuai harkat martabat manusia. Ini juga tertera dek pada PP RI No. 31 Tahun 1980.

PP RI No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

The image displays four pages of the Indonesian Government Regulation (PP RI No. 31/1980) titled "Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis". The pages are arranged in a 2x2 grid, showing articles 5 through 22. The text is in Indonesian and includes the following key sections:

- Page 1 (Top Left):** Article 5 (USHA PREVENTIF) and Article 6. Article 5 states that preventive measures are taken to prevent the occurrence of vagrants and beggars in society. Article 6 lists preventive measures: a) social service, b) social work, c) social work, d) social work, e) social work, f) social work.
- Page 2 (Top Right):** Article 7 (USHA REPRESIF) and Article 8. Article 7 states that repressive measures are taken against vagrants and beggars who do not respond to preventive measures. Article 8 lists repressive measures: a) social service, b) social work, c) social work, d) social work.
- Page 3 (Bottom Left):** Article 9 (USHA REHABILITATIF) and Article 10. Article 9 states that rehabilitative measures are taken for vagrants and beggars who are unable to support themselves. Article 10 lists rehabilitative measures: a) social service, b) social work, c) social work, d) social work.
- Page 4 (Bottom Right):** Article 11 through Article 22. Article 11 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 12 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 13 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 14 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 15 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 16 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 17 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 18 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 19 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 20 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 21 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars. Article 22 states that the government is authorized to take measures to manage vagrants and beggars.



3.2. Faktor Penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan program pasti akan muncul faktor penghambat dan pendukung di dalamnya, begitu pula dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu dengan adanya penghambat dan pendukung maka proses pembaharuan dan pengevaluasian dapat dilakukan agar Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dapat lebih ditingkatkan. Berikut beberapa faktor penghambat dari penertiban PGOT

➤ Faktor Penghambat

- Lemahnya Sikap Mental Pengemis
- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PGOT Terbatas
- Masyarakat yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Pengemis

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program peningkatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungan. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak ada timpang tindih dalam sifat peraturan dan kebutuhan masyarakat dimana terciptanya banyak penguatan sosialisasi peraturan kepada lingkungan daerah. Sama halnya dengan temuan (Joshua Fernando, 2019) Meskipun razia telah rutin dilakukan oleh Satpol PP, PGOT masih saja berkeliaran dan semakin banyak di hari-hari besar. Mungkin karena pemberian sanksi tidak memberi efek jera. Kendala dalam penertiban dan penanggulangan PGOT ini adalah anggaran yang diberi dari pemerintah Kota yang kurang memadai serta adanya dorongan masyarakat yang

memberikan uang sehingga PGOT terbiasa untuk meminta-minta di jalanan ataupun tempat umum.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja yaitu Lemahnya Sikap Mental Pengemis, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PGOT Terbatas, Masyarakat yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Pengemis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengambilan data sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan dan didukung kajian teori dari tinjauan pustaka, kemudian diperjelas dengan uraian pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara optimal.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur belum berjalan secara optimal. Kesimpulan ini merupakan hasil analisis fokus penelitian yang ditinjau melalui lima (5) dimensi operasional menurut Arimbi Horoeopetri dan Santosa. Faktor Penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Terdapat tiga (3) faktor penghambat yang berhasil diidentifikasi yaitu pertama, Lemahnya Sikap Mental Pengemis, kedua Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PGOT Terbatas dan ketiga, Masyarakat yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Pengemis. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Terdapat tiga (3) upaya yang dilakukan yaitu pertama, Perbaikan Pada Lemahnya Sikap Mental Pengemis, kedua yaitu Melakukan Penambahan Anggota Satpol PP dan ketiga, Memberi Sanksi Tegas Kepada Masyarakat yang Tetap Memberikan Uang Kepada Para Pengemis.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di

Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abu Ahmadi. *Sosiologi Pendidikan*. Bina Ilmu, 1982.

Ahmad Amru Muiz. "Target Turunkan Angka Kemiskinan, Pemkab Nganjuk Bagikan 5.000 Kartu Nganjuk Mandiri Sosial." *Surya.co.id*, 2019. <https://surabaya.tribunnews.com>.

Andi Kardian Riva'i. *Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.

Desi Alfiani. "Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Negara* 6, no. 1 (2018): 7077–89. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal_Desi_Alviaana_\(02-13-18-05-38-03\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal_Desi_Alviaana_(02-13-18-05-38-03).pdf).

Harefa, Brian. "Makalah Gepeng," 2012. http://www.academia.edu/6492300/MAKALAH_GEPENG (di unduh %0A pada 10 September 2021 Pukul 08.00).

Inu Kencana Syafii. *Ilmu Administrasi Publik*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Labolo Muhaddam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Mubyarto. *Teori Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Ekonomi Pancasila*. Jurnal Ekonomi Rakyat, 2003.

NAJEMIA, SIP, R Adawiyah, and TEK Lestiyani. "Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan Dan Pengemis," 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/1782/>.

NATEL JAMSON RUMAPEAANA. "PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA MEDAN," 2020.

Nazir.Mohammad, Ph.D. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Ndraha Taliziduhu. *Teori Budaya Organisasi, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Nugroho, Adi. "Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (Pgot) Di Kabupaten Demak Skripsi," 2019.

Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial. Pertama. Ed. Lutfiah*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

Robinson, Oliver C. *Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide*. *Qualitative Research in Psychology* 11(1): 25–41, 2014.

Simangunsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Ketiga. Bandung: Alfabeta, 2017.

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suparlan. *Politik Dalam Golongan Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: yayasan obor indonesia, 1993.

Syafi'ie, Inu Kencana. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

TRIBUWONO, JONATHAN. "Teori Van Meter Van Horn." *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)*, 2017.

Ulber, Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Umam, Saiful. "Istilah 'Ngemis' Ternyata Bermula Dari Santri Dalam Dalam," 2010. <http://www.lareosing.org/archive/index.php/t-1691.html> (diunduh pada: 10 september 2021 08:35).

Walter Friedlaner. *Introduction To Social Welfare 3rd Edition*. New Jersey: Prentice-Hall., 1982.

JURNAL DAN ARTIKEL

Nugroho, Adi. “Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar (Pgot) Di Kabupaten Demak Skripsi,” 2019.

Ahmad Amru Muiz. “Target Turunkan Angka Kemiskinan, Pemkab Nganjuk Bagikan 5.000 Kartu Nganjuk Mandiri Sosial.” Surya.co.id, 2019. <https://surabaya.tribunnews.com>.

Desi Alfiani. “Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.” *EJournal Administrasi Negara* 6, no. 1 (2018): 7077–89. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal Desi Alviana \(02-13-18-05-38-03\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/02/Jurnal%20Desi%20Alfiana%20(02-13-18-05-38-03).pdf).

Harefa, Brian. “Makalah Gepeng,” 2012. http://www.academia.edu/6492300/MAKALAH_GEPENG (di unduh %0A pada 10 September 2021 Pukul 08.00) .

NAJEMIA, SIP, R Adawiyah, and TEK Lestiyani. “Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan Dan Pengemis,” 2019. <http://repository.uinjambi.ac.id/1782/>.

NATEL JAMSON RUMAPEAANA. “PELAKSANAAN UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL KOTA MEDAN,” 2020.

TRIBUWONO, JONATHAN. “Teori Van Meter Van Horn.” *Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)*, 2017.

Umam, Saiful. “Istilah ‘Ngemis’ Ternyata Bermula Dari Santri Dalam Dalam,” 2010. <http://www.lareosing.org/archive/index.php/t-1691.html> (diunduh pada: 10 september 2021 08:35).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.